



Buletin Parlementaria

Nomor 1220/II/X/2022 • Oktober 2022



P20, Penguatan Parlemen Solusi Atasi Krisis Global



3 Lodewijk F. Paulus
Jajal Mobil Listrik
Rakitan Anak
Bangsa



4 Gus Muhaimin
Ungkapkan
Ketua Parlemen
Inggris Kagumi
Kebhinekaan RI



9 772614 339005



P20, Penguatan Parlemen Solusi Atasi Krisis Global



Ketua DPR RI DR. (H.C.) Puan Maharani berfoto bersama dengan Presiden RI, Presiden IPU, serta perwakilan delegasi Parlemen P20 di Gedung Nusantara, Kamis (6/10).

Perhelatan 'The 8th G20 Parliamentary Speaker's Summit' (P20) telah digelar sejak 5-7 Oktober 2022. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengatakan, di perhelatan ini, para parlemen dunia sepakat bahwa penguatan peran parlemen merupakan solusi dalam menghadapi situasi global yang sulit.

"Perhelatan yang digelar selama dua hari tersebut telah sukses menghasilkan suatu babak baru dalam mengatasi berbagai permasalahan global melalui penguatan multilateralisme. Sesuai tema yang diusung yaitu 'Stronger Parliament for Sustainable Recovery', para pemimpin parlemen negara-negara

anggota G20 sepakat untuk terus meningkatkan peran parlemen pada tataran global," jelas Puan dalam pidato penutupan P20 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10).

Dijelaskannya, selama dua hari diskusi, para pemimpin parlemen membahas isu-isu prioritas mulai dari pembangunan berkelanjutan, *green economy*, ketahanan pangan dan energi serta tantangan ekonomi, hingga kesetaraan gender. P20 Summit sendiri, menghasilkan *outcome document* berupa *Chair's Summary* yang menggarisbawahi beberapa hal penting.

"Diantaranya yakni, multilateralisme merupakan kanal paling efektif untuk mengatasi ragam tantangan global

bersama. lalu perang dan konflik bersenjata merupakan ancaman atas keamanan dan tatanan global serta membawa dampak negatif terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan perekonomian global. dan mendesak negara-negara G20 untuk melipatgandakan upaya dalam mengatasi perbedaan, mempromosikan perdamaian, dan memperkuat pemulihan ekonomi," jelasnya.

Lebih lanjut, hal penting yang digaris bawahi dalam *Chair's Summary* P20 adalah perlunya sarana pembiayaan yang efektif dan inovatif, termasuk keuangan campuran, untuk membantu mempersempit kesenjangan keuangan, SDG's dan perlunya ekonomi digital yang inklusif, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan penanganan perubahan iklim.

"Pentingnya realisasi komitmen negara-negara maju untuk segera memenuhi target 100 miliar dolar AS per tahun hingga 2025 serta komitmen untuk transfer teknologi ke negara-negara berkembang. kemudian, urgensi kesetaraan gender yang dapat mewujudkan kemakmuran yang lebih besar dan pembangunan berkelanjutan untuk semua. Serta, parlemen yang kuat adalah kunci bagi demokrasi yang kuat dan untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan kesejahteraan warga negara berada di pusat pembuatan kebijakan dan legislasi," lanjutnya.

Kedepannya, poin-poin yang tertuang dalam *outcome document* itu merupakan wujud komitmen bersama para pemimpin parlemen negara-negara G20, yang akan menjadi masukan bagi pemerintah RI khususnya dalam KTT G20 yang akan dilaksanakan pada bulan November tahun ini di Bali. ● **we/es**





Lodewijk F. Paulus Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa



Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus (kiri) saat mencoba mengendarai mobil listrik Hyundai IONIQ 5, di lingkungan Gedung Nusantara, Selasa (4/10).

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa, yaitu Hyundai IONIQ 5, di lingkungan Gedung Nusantara. Lodewijk menjelaskan mobil listrik tersebut akan digunakan sebagai kendaraan bagi delegasi selama rangkaian kegiatan P20 yang akan dilaksanakan pada 5-7 Oktober tahun ini di Kompleks Parlemen.

"Penggunaan mobil listrik ini sejalan dengan salah satu tema utama yang akan dibahas dalam P20, yakni pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. DPR RI ingin menunjukkan komitmen bahwa Indonesia serius dalam mengurangi emisi," ujar Lodewijk kepada **Parlementaria**, Selasa (4/10).

Diketahui, mobil listrik tersebut

mengusung prinsip berkelanjutan dengan menghadirkan material ramah lingkungan. Sehingga DPR RI ingin negara-negara G20 dan negara undangan tuan rumah mengetahui bahwa Indonesia juga telah dapat memproduksi kendaraan listrik merek Hyundai IONIQ 5 dengan keberadaan pabrik di Cikarang.

"Serta kami ingin meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan untuk generasi mendatang," ujar Lodewijk. Diketahui, Salah satu sub tema yang diangkat dari Sidang P20 tersebut terkait energi berkelanjutan dan perubahan iklim. Kendaraan listrik merupakan implementasi dari aspek energi berkelanjutan yang ramah lingkungan dan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. • **rdn/aha**



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSi (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Prima Danutirto, A.Md, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom, Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irianadi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsa Dysie, Baggys Maeshnien, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Rini Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friedrick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFI

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Ketua Parlemen Inggris Kagumi Kebhinekaan RI

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

(Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar telah melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Inggris, Sir Lindsay Harvey Hoyle. Didampingi Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, pertemuan itu membahas berbagai isu yang sedang berkembang saat ini, termasuk agenda bersama P20 yang akan secara resmi dibuka pada Kamis, 6 Oktober 2022.



Wakil Ketua DPR RI A. Muhaimin Iskandar bertemu Ketua Parlemen Inggris, Rt. Hon Lindsay Hoyle.

Bahas IEU-CEPA dengan ‘Vice President of European Parliament’

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel melakukan pertemuan

bilateral dengan *Vice President of European Parliament*, Nicola Gertrud Ruth Beer. Pertemuan ini membahas banyak hal, diantaranya mengenai perubahan iklim dan Perundingan *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA).

"Kita pertama mendiskusikan tentang kerja sama antara



FOTO: AZK/PDT

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat bertukar cenderamata usai pertemuan bilateral dengan Vice President of European Parliament Nicola Gertrud Ruth Beer.

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



"Ngobrol ngalor-ngidul dengan Ketua DPR atau 'House of Commons Inggris Raya', Rt Hon Lindsay Hoyle. Ternyata beliau suka sekali dengan semua makanan menu Indonesia, termasuk yang pedas-pedas," kata Gus Muhaimin dalam siaran persnya yang diterima Parlemen pada Kamis, (6/10).

Terlebih Inggris dan Indonesia sejak dulu telah memiliki hubungan bilateral yang kuat di berbagai bidang. Gus Muhaimin juga menyampaikan bahwa Hoyle begitu kagum dengan kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Tak hanya kekayaan alam, Hoyle juga mengagumi Indonesia sebagai negara yang memegang kuat kebhinekaan, ragam budaya, adat istiadat, dan juga etnis di Indonesia begitu harmonis. • gal/aha

Indonesia-Uni Eropa, baik itu pada sektor perdagangan, investasi, dan industri. Di samping itu juga kita mendiskusikan perlu ada pembahasan bersama antara parlemen Indonesia dan parlemen Uni Eropa tentang krisis pangan dunia dan juga krisis energi, dan juga masalah *climate change*," jelas Gobel kepada **Parlemen** di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10).

Untuk itu, pertemuan ini juga membahas mengenai Perundingan IEU-CEPA sebagai upaya mendorong peningkatan transaksi perdagangan dan memberikan manfaat bagi Indonesia dan seluruh negara anggota Uni Eropa.

Ke depan parlemen akan lebih aktif untuk melakukan dialog-dialog antara parlemen Indonesia dengan parlemen Uni Eropa untuk mendukung kerja sama bilateral lainnya melalui diplomasi parlemen. • we/es

Jelang KTT G20, Komisi I Cek Kesiapan BIN Daerah Bali

Panitia Kerja (Panja) Persiapan G20 Komisi I DPR RI mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Intelijen

Daerah (Kabinda) Bali, di Badung, Bali Jumat (30/9). Pertemuan tersebut membahas mengenai deteksi dini dan peringatan dini atas persiapan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali yang puncaknya akan digelar pada November 2022 mendatang.

"Kita ingin melakukan pendalaman terkait dengan persiapan pengamanan dari aspek intelijen karena kita tahu bahwa G20 ini adalah perhelatan yang sangat penting tidak

hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk dunia," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya, saat membuka pertemuan.

Sehubungan dengan Rapat Dengar Pendapat bersama Kabinda ini, Riefky mengatakan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Persiapan G20 Komisi I DPR RI berharap para pemangku kepentingan dapat memitigasi gangguan-gangguan yang mungkin akan terjadi terutama pada pelaksanaan KTT G20.

"Tentu ini menjadi kepentingan kita bersama, kita berharap baik dari BIN, Panglima TNI kemudian Polri, begitu juga dari Kemenhan dan BSSN tentu semua mempunyai kerja besar untuk suksesnya G20 dari aspek pengamanan berbagai lini," pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut. • blf/aha

Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Teuku Riefky Harsya.



FOTO: BIN/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Komisi II Siapkan **Tiga Kanal Solusi** Penyelesaian Tenaga Honorer



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/9).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyatakan DPR RI, terutama

Komisi II saat ini tengah terus mencari jalan untuk penyelesaian masalah tenaga honorer atas surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengenai penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah mulai tanggal 28 November 2023. Ia mengungkapkan ada tiga kanal solusi untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yakni melalui RUU ASN, Pansus, dan Kebijakan teknis Pemerintah.

"Komisi II hari ini pun kita terus mencari jalan, ada beberapa kanal yang hari ini sedang kita siapkan. Pertama RUU ASN, RUU ASN ini sudah lama kita bahas dan sedang mau kita revisi. Mudah-mudahan ini harus tersambung dengan persoalan ini," kata Yanuar se usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi

II DPR RI terkait evaluasi tenaga honorer di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/9).

Kedua, lanjut Politisi Fraksi PKB tersebut, saat ini DPR RI juga tengah berupaya membentuk Panitia Khusus (Pansus) khusus tenaga honorer. Pembentukan Pansus ini dilakukan karena tenaga honorer ini tersebar di banyak tempat, banyak instansi dengan karakteristik yang beragam dari guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, tenaga teknis, tenaga administrasi hingga sopir.

"Jadi rentangnya itu luar biasa variatif, sehingga harus dibentuk pansus yang itu gabungan dari beberapa komisi terkait. Seperti komisi II, komisi IV, komisi VIII, komisi IX, komisi X, mungkin terakhir komisi V juga ikut andil. Kenapa? karena harus lintas, lintas nggak bisa dipecahkan oleh satu sektor, satu instansi saja," jelas Yanuar.

Ketiga, masih kata Yanuar, adalah persoalan kebijakan teknis

pemerintah yang sedang digarap yaitu berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur manajemen PPPK yakni Surat Edaran Kementerian PAN-RB mengenai penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah mulai tanggal 28 November 2023 dan saat ini tenaga honorer tengah melakukan proses pendataan administrasi hingga 30 September.

"Nah atas dasar ini, kita lihat nanti bagaimana penanganan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Tetap kita kontrol dengan ketat, tetap kita awasi, kita akan dalam progres laporan yang disampaikan pemerintah. Nanti kita cek sama-sama kendalanya apa, hambatannya apa, apakah semua data yang kita maksud sudah terserap semua kedalam database atau tidak? Kalau sudah terdata, data sudah masuk apakah gejala masih juga muncul? Tiga kanal ini yang saya kira yang nanti akan kita jajaki, kita dalam bersama-sama di Jakarta," tutupnya. ● gal/aha

Anggota DPR Apresiasi Pemerintah Akomodir Kebebasan Pers di KUHP

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan mengapresiasi Tim Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang telah mengakomodasi pasal-pasal yang mendukung kebebasan pers untuk masuk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sebagaimana masukan Dewan Pers. Mengingat, usulan yang telah disampaikan Dewan Pers merupakan bagian dari semangat melahirkan KUHP yang menjunjung tinggi kemerdekaan pers sebagai basis membangun demokrasi Indonesia kedepannya.

Demikian disampaikan Hinca saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Tim Pemerintah terkait penjelasan pemerintah atas hasil sosialisasi RUU KUHP dengan beberapa pemangku kepentingan yang digelar secara 'hybrid' di Ruang Rapat

Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/10). Hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut mewakili Tim Pemerintah yaitu Wamenkumham Prof. Edward Omar Sharif Hiariej beserta segenap jajaran Kemenkumham.

"Semangat demokrasi kita dalam menjaga kebebasan pers merupakan kesempatan emas untuk memasukkannya dalam KUHP kita ini. Oleh karena itu, apa yang disampaikan teman-teman Dewan Pers ini adalah bagian dari semangat kita melahirkan KUHP kita yang mendukung dan menjunjung tinggi kemerdekaan pers sebagai basis kita untuk membangun demokrasi kita kedepan. Maka, saya sangat mengapresiasi tinggi Tim Pemerintah yang telah merespon masukan Dewan Pers dengan sangat baik," ujar Hinca.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga menyampaikan apresiasi terhadap Tim Pemerintah yang telah menggunakan Putusan Mahkamah Agung

(MA) No.1608/K/Pid/2005 tanggal 9 Februari 2006 sebagai rujukan dalam mengakomodir usulan Dewan Pers untuk masuk dalam KUHP. Hinca menilai, Putusan MA No.1608/K/Pid/2005 tanggal 9 Februari 2006 tepat sebagai acuan karena sangat membela kinerja jurnalistik.

"Saya ingin memberi apresiasi untuk itu. Karena, kalau kita ingat beberapa waktu lalu Dewan Pers juga telah menyampaikan pandangan-pandangannya. Oleh karena itu, kita menghormati pandangan Dewan Pers sudah diakomodir oleh Tim Pemerintah. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pasal-pasal yang mendukung kebebasan pers jangan ada yang terlepas dan diakomodir di bagian penjelasan dalam KUHP," tegas Hinca.

Diketahui bahwa, Putusan MA No.1608/K/Pid/2005 tanggal 9 Februari 2006 itu antara lain berbunyi bahwa Aturan Pers haruslah lebih diprioritaskan dibanding aturan lainnya termasuk KUHP.

Wamenkumham mengungkapkan usulan Dewan Pers untuk reformulasi Pasal 473 ayat (3), Pasal 443 ayat (5) dan Pasal 440 ayat (2) RKUHP yaitu mengatur "tugas jurnalistik sebagai salah satu pengecualian atau alasan penghapusan pidana khusus dari Tindak Pidana Penghinaan (Pencemaran), Pencemaran Orang Mati dan Penghinaan Ringan (bersama 'kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri') dapat dipertimbangkan untuk diakomodasi dalam penjelasan. • pun/aha



Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan.

FOTO: IKA/PDT

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi IV Soroti Pengelolaan Sampah di Yogyakarta



Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus saat memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI meninjau TPA Payungan, di DIY, Rabu (28/9).

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan dari tiga daerah, yaitu Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus menyayangkan keberadaan ternak sapi di sekitar TPA Piyungan, yang berpotensi mengonsumsi sampah.

"Ini luar biasa sekali tempat pembuangannya, tapi yang sangat disayangkan di belakang sana ada tumpukan sampah dan di sana juga ada sapi. Mereka (sapi) pasti makan sampah plastik yang bisa menjadi mikroplastik jika masuk di dalam darah. Dan bila dikonsumsi oleh warga setempat dapat menyebabkan penyakit kanker," kata Alien usai memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI meninjau TPA Payungan, di DIY, Rabu (28/9).

Menanggapi hal itu, Alien

mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera menyelesaikan permasalahan sampah ini, karena dampaknya tidak hanya di DIY, tapi akan meluas ke daerah lainnya.

"Kami akan mendorong pemerintah pusat, KLHK untuk memberikan atensi dan bantuan untuk daerah dalam penanganan sampah ini. Jika melihat bentuk sampah seperti ini, terus baunya ternyata dari sampah organik, berarti kita harus bekerja sama dengan pemerintahan yang lain. Atau pengolahan sampah organik itu untuk dijadikan pupuk, ini kan berhubungan dengan pertanian," ungkap Politisi Partai Golkar itu.

Alien menyayangkan sampah rumah tangga atau sampah organik yang masih tercampur dengan sampah jenis lainnya pada saat diangkut, sehingga menimbulkan bau tidak sedap. "Inilah kesalahan dari pengolahan sampah kita di daerah. Seharusnya sudah ada pemilahan sampah organik dan sampah plastik. Tapi diangkat dalam satu truk dan tercampur-campur lagi, itu kan percuma. Inilah yang saya maksud kita harus sinergi," sebut Alien.

Terakhir, Alien mengatakan penanganan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) ini akan dibahas dalam rapat kerja Panja Komisi IV DPR RI, agar segera disinkronkan dengan pemerintah pusat. • **mri/aha**



Selektif Kelola Agrowisata Demi Lindungi Hayati Indonesia

Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menyoroti keputusan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dalam menyeleksi pihak ketiga untuk



Revitalisasi Danau Rawa Pening Butuh Kerja Sama Lintas Instansi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan sedimentasi di Danau Rawa Pening sudah sangat tinggi, sehingga airnya meluap dan kemudian menggenangi lahan pertanian masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya sangat penting untuk merevitalisasi Rawa Pening melalui kerja sama lintas instansi. Kegiatan revitalisasi itu salah satunya sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Keementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen PDASR. Mereka memiliki program-program untuk menahan sedimentasi yang

lari ke danau tersebut," ungkap Anggia usai giat penanaman pohon dan berdiskusi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali (BPDSHL) Jratun di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (28/9).

Politisi Fraksi PKB itu menjelaskan, penanaman oleh masyarakat di Desa Candi didominasi tanaman sayur dan bunga. Namun untuk mencegah erosi harus ada tanaman tegakan yang menahan. Oleh karena itu, dikembangkan program Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang memproduksi bibit-bibit tegakan yang bisa menahan erosi. Sebagian besar didominasi Hortikultura, di antaranya alpukat dan sengo.

menjalin kerja sama agrowisata. Dirinya menilai pengelolaan agrowisata, terutama di Kabupaten Bandung, jauh dari semangat konservasi alam sekaligus pemberdayaan komunitas.

"Pariwisata (agrowisata) ini yang jauh dari semangat kearifan lokal, menjauh dari semangat konservasi, menjauh dari semangat pemberdayaan komunitas. Karena itu, teman-teman (para Anggota Komisi IV) merasa PTPN dalam melakukan

kerja sama dengan pihak ketiga ini tidak memiliki suatu konsep atau bahkan *blueprint* agrowisata," ungkap Ansy Lema, sapaan akrabnya, usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/9).

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan itu turut menyayangkan sikap para pengusaha yang berinvestasi di bidang agrowisata belum memiliki konsep yang kokoh dan visioner, sehingga merusak hayati setempat. Sehingga, Ansy Lema menegaskan agar PTPN lebih selektif menentukan mitra sebagai pihak ketiga yang akan membangun agrowisata di lahan-lahan PTPN. • **ts/aha**



FOTO: AIS/PDT

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat giat penanaman pohon dan berdiskusi dalam Kunspek Komisi IV DPR RI di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (28/9).

"KBR ini adalah salah satu cara meningkatkan kapasitas masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Artinya tidak hanya lingkungannya lestari, tetapi juga masyarakat petani itu bisa mendapatkan sesuatu. Misalnya alpukat, tadi disampaikan satu pohon itu bisa (menghasilkan pendapatan) sampai Rp20 juta. Memang kita lihat pohonnya lebat dan kualitasnya bagus," apresiasi Legislator Dapil Jawa Timur VI tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen PDASRH KLHK Dyah Murtiningsih berharap pihak yang terkait dengan rencana pengelolaan Rawa Pening agar dapat berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebab hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab KLHK saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi serta kementerian lain, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan juga Kementerian Pertanian. • **ais/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Anggota Komisi IV DPR RI
Yohanis Fransiskus Lema.



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: WIL/PTD

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat foto bersama usai Kunspek ke TMII, Jakarta Timur.

Tinjau TMII, Komisi V Sarankan Renovasi Anjungan

Komisi V DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, untuk melihat renovasi yang dilakukan sejak Januari 2022 tersebut. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, dalam kunjungan ini pihaknya ingin memastikan kesiapan TMII menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Presidensi G20, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur dan transportasi.

"Saya berdiskusi kecil dengan Bu Dirjen (Cipta Karya Kementerian PUPR), rupanya anjungan-anjungan daerah yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia di TMII ini pemeliharaannya, pembangunannya mungkin dulu dibangun oleh

negara, tapi pemeliharaan dan pemanfaatannya dan pengelolannya oleh pemerintah daerah, termasuk tenaga yang di sana dari pemerintah daerah masing-masing provinsi," kata Lasarus saat memimpin Kunspek Komisi V DPR RI ke TMII, Jakarta Timur, Rabu (28/9).

Lasarus menjelaskan, renovasi TMII menghabiskan anggaran mencapai Rp1,08 triliun yang diikerjakan dari Januari-Agustus 2022 oleh Kementerian PUPR. Dalam pertemuan ini, Politisi PDI-Perjuangan tersebut menyayangkan anjungan-anjungan daerah yang ada tidak ikut direnovasi dengan alasan setiap anjungan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah masing-masing.

"Kami akan lihat yang sudah direnovasi dan yang belum

direnovasi, yang belum direnovasi pasti milik daerah. Tadi saya bicara kenapa tak diserahkan kepada pusat seluruhnya. Maksud saya bangunan fisik menurut saya dikelola sekalian pemerintah pusat. Kenapa ini masih dipisah-pisah tanggung jawab daerah, saya khawatir yang lain sudah dibenahi rapi, tapi masih ada yang belum rapi," tambah Lasarus.

Diketahui, Kementerian Sekretaris Negara yang membawahi pengelolaan TMII bukanlah mitra kerja Komisi V DPR RI, namun demikian Lasarus mengatakan akan menjalin komunikasi dan berdiskusi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk juga merenovasi setiap anjungan-anjungan yang ada di TMII.

"Kami mendorong anjungan-anjungan ini juga direnovasi karena inilah ciri khas yang harusnya ditonjolkan di TMII itu sendiri. Informasi yang kita dapat, TMII direnovasi atas anjuran dari Kementerian Dalam Negeri, tentu menjadi tidak sinkron kalau penanggungjawab renovasi ini diserahkan ke PT Taman Wisata Candi (TWC) tapi anjungan-anjungannya tanggung jawab daerah," tutup Legislator Dapil Kalimantan Barat II itu. • **we/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi VI Setujui Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela RI-UK

Komisi VI DPR RI menyetujui Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris Raya (UK) tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan dan Perdagangan Produk Kayu ke Kerajaan Inggris Raya melalui mekanisme Peraturan Presiden (Perpres).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola Kementerian Perdagangan RI, Plt. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Direktur Jenderal Amerika-Eropa Kementerian Luar Negeri RI, di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/10).

Lebih lanjut Hekal mengatakan, Komisi VI DPR RI meminta pemerintah RI melalui Kemendag untuk menyampaikan rencana aksi tindak lanjut dari Perpres tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara pemerintah RI dengan Kerajaan Inggris Raya tersebut.

”

**MEMINTA KEMENDAG
AGAR DAPAT BERSINERGI
DENGAN KEMENTERIAN/
LEMBAGA LAIN UNTUK
MENINGKATKAN
KEPERCAYAAN
KONSUMEN
INGGRIS RAYA
DAN DUNIA**

**Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Mohamad Hekal.**



FOTO: OJI/PDT

“(Rencana aksi) dalam kaitannya mendorong pengembangan dan perlindungan usaha kecil menengah (UMKM) dan masyarakat hutan adat,” jelasnya.

Selain itu, masih kata Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, Komisi VI DPR RI juga meminta Kemendag agar dapat bersinergi dengan kementerian/lembaga lain untuk meningkatkan kepercayaan konsumen Inggris Raya dan dunia terhadap produk kayu Indonesia sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menutup rapat tersebut, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti persetujuan dari Komisi VI DPR RI tersebut. “Kami dari pihak pemerintah akan segera menindaklanjuti penyusunan instrumen itu, nanti

instrumen ratifikasinya akan di-lead oleh Kementerian Perdagangan dengan dukungan dari K/L terkait,” tutup Alue Dohong.

• **bia/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Mulyanto Minta Pemerintah Evaluasi Program Hilirisasi Nikel



FOTO: OJI/PDT

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta pemerintah mengevaluasi program hilirisasi nikel yang berjalan selama ini. Ia menilai hasil evaluasi hilirisasi nikel ini sangat penting karena bisa menjadi acuan bagi pelaksanaan program hilirisasi hasil tambang lainnya seperti timah, bauksit, dan lain-lain.

"Sejauh pengamatan saya, pelaksanaan program hilirisasi nikel banyak merugikan masyarakat dan negara. Masyarakat hanya dapat menikmati hasil jual nikel yang kecil ke smelter. Sedangkan negara harus menanggung berbagai risiko untuk pelaksanaan program ini. Karena itu saya minta Pemerintah serius mengevaluasi agar kejadian yang

sama tidak dialami program lain," ujar Mulyanto dalam siaran persnya, Kamis (6/10).

Lebih lanjut Politisi Fraksi PKS ini menilai bahwa pengorbanan masyarakat sangat besar dalam program hilirisasi nikel ini. Penambang tidak dapat menikmati harga internasional ekspor nikel yang tinggi dan terpaksa menjual ore mereka kepada industri smelter dengan harga rendah. Sementara itu investor smelter dimanja dengan berbagai fasilitas 'tax holiday' dan kemudahan fiskal dan non fiskal, termasuk tenaga kerja kasar asing (TKA Cina).

"Jangan sampai program ini hanya indah didengar, namun manfaatnya kecil bagi pembangunan nasional. Karena

mandeg pada produk setengah jadi seperti 'nikel matte' atau 'nikel pig iron' (NPI) dengan nilai tambah rendah," terang Mulyanto.

Yang lebih ironis lagi, tambahnya, Indonesia seakan-akan menjadi "bumper" yang berhadapan dengan WTO, karena tuduhan larangan ekspor nikel. Investor Cina justru meraup untung dari menjual nikel kekayaan alam kita kepada perusahaan raksasa mobil listrik Tesla. Ini adalah sebuah paradoks di negeri yang kaya sumber daya alam.

"Saatnya kita melarang ekspor produk setengah jadi nikel ini. Kementerian Perindustrian harus tampil di depan memimpin program hilirisasi ini, bukannya Dirjen Minerba, Kementerian ESDM. Agar hasilnya tidak mandeg seperti ini. Selain itu, harus jelas terlebih dahulu road map industri nilai tambah tinggi yang ingin dibangun dan dikembangkan sebelum program hilirisasi ini merembet pada bahan tambang lainnya," tambahnya.

Untuk diketahui, Indonesia kini tengah menghadapi gugatan Uni Eropa di WTO lantaran Indonesia melarang kebijakan ekspor nikel demi program hilirisasi di dalam negeri. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kepada media sempat menegaskan komitmen pemerintah untuk menerapkan hilirisasi industri dalam negeri. Dia mengatakan dalam gugatan tersebut juga belum diputuskan bagaimana nasib Indonesia. Pasalnya, hilirisasi adalah gagasan besar Presiden Joko Widodo dalam visinya tentang transformasi ekonomi. ● **ayu/aha**



Komisi VIII Harap Komisioner KPAI Terpilih Dapat Lebih Libatkan Masyarakat

Komisi VIII DPR RI baru saja menyepakati sembilan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2022-2027 setelah sebelumnya telah melaksanakan *fit and proper test* terhadap 18 calon Komisioner KPAI pada Kamis (22/9/2022). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang berharap kesembilan komisioner terpilih dapat lebih melibatkan masyarakat dalam mendeteksi kasus-kasus yang terjadi pada anak.

"Kita sebenarnya menekankan aspek pencegahan ya (kepada

Komisioner KPAI), bagaimana alarm (adanya kasus yang melibatkan anak) itu bisa dipasang di seluruh penjuru, karena tempat atau kejadian kekerasan terhadap anak ini tidak bisa di kluster, umpamanya di area remang-remang, nggak bisa begitu, bahkan di tempat-tempat suci pun terjadi," ujarnya kepada **Parlementaria** usai rapat internal hasil *fit and proper test* calon anggota KPAI periode 2022-2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9).

Sebab, menurut Marwan, saat ini, deteksi kasus-kasus yang terjadi pada anak terkesan lamban. Misalnya

ketika ada kasus pelecehan yang terjadi pada anak, baru terungkap setelah mendapati banyak korban. "Ada juga anak yang teraniaya, sebetulnya tetangganya sudah tau bahwa anak tersebut teraniaya oleh ibunya, tapi alarm itu tidak berbunyi, maka sampai korban bahkan ada yang tewas," jelasnya.

Untuk itu, Marwan menilai, agar dapat mendeteksi kasus yang terjadi pada anak, keterlibatan masyarakat dinilai sangat penting. "Tentu ada sosialisasi ada advokasi, karena masyarakat yang mengetahui itu sebetulnya ada rasa khawatir kalau dia laporkan malah berbalik dia yang menjadi kesakitan," imbuh politisi PKB tersebut.

Lebih lanjut, Marwan menekankan agar KPAI dapat terus meningkatkan aspek perlindungan dan aspek rehabilitasi terhadap korban anak-anak. Selain itu, ia juga berharap agar komisioner KPAI nantinya memiliki nyali yang lebih berani dalam menghadapi predator anak dan menuntaskan kasus-kasus yang terjadi pada anak.

"Karena dalam hal urusan kekerasan seksual terhadap anak, itu kalau diusut, diperdalam, sebagian besar pelaku juga korban masa lalu. Berarti kan terapinya tidak tuntas, maka aspek rehabilitasi itu juga penting, dimana direhabilitasi, siapa yang merehabilitasi, berapa lama sampai kita pastikan bahwa dia pulih, tidak akan melakukan hal yang sama," tutup Legislator Dapil Sumatera Utara II itu.

Adapun sembilan komisioner KPAI 2022-2027 terpilih yakni, dari unsur tokoh agama, Sylvana Maria; dari unsur tokoh masyarakat Ai Rahmayanti dan Diyah Puspitarini; dari unsur organisasi kemasyarakatan, Margaret Aliyatul Maimunah; dari unsur pemerintah Aris Leksono; dari unsur dunia usaha Kawiyan dan dari unsur kelompok masyarakat peduli anak adalah Jasra Putra, Ai Maryati Solihah dan Dian Sasmita. • **bia/aha**



FOTO: RNI/PDT

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat *fit and proper test* calon anggota KPAI periode 2022-2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Pemerintah Harus Pastikan Faskes Beri Perawatan Maksimal untuk Korban Kanjuruhan

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher meminta pemerintah memberikan pelayanan perawatan terbaik untuk korban tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Pemerintah harus memberikan kepastian akan perawatan maksimal bagi para korban. "Kemenkes harus memastikan setiap RS dan faskes memberikan pelayanan terbaik terhadap korban Kanjuruhan. Ini bukan sekadar bencana sepak bola tapi juga bencana kemanusiaan," kata Netty dalam keterangannya, Selasa (4/10).

"Harus dimonitor pelaksanaan di lapangan. Jangan sampai nanti mengemuka cerita melalui platform media sosial bahwa pasien korban Kanjuruhan terlantar dan tak mendapatkan perawatan maksimal," tambahnya lagi. Netty juga meminta pemerintah agar melakukan pendataan jumlah korban secara valid. "Informasi soal jumlah korban keseluruhan ini juga masih menimbulkan pertanyaan dan simpang siur. Pemerintah menyebut korban yang meninggal ada 125 orang sementara supporter Arema mengatakan lebih dari 200 orang," katanya.

FOTO: PPT

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher.

”

INFORMASI SOAL JUMLAH KORBAN KESELURUHAN INI JUGA MASIH MENIMBULKAN PERTANYAAN DAN SIMPANG SIUR. PEMERINTAH MENYEBUT KORBAN YANG MENINGGAL ADA 125 ORANG SEMENTARA SUPORTER AREMA MENGATAKAN LEBIH DARI 200 ORANG

Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah harus memiliki data akurat dan memastikan seluruh

korban dan keluarga korban mendapatkan hak yang sama seperti santunan dan sebagainya. Netty juga meminta agar kasus tragedi Kanjuruhan ini diusut hingga tuntas. "Kronologi, penyebab, aspek kelalaian penyelenggara hingga potensi pelanggaran personel harus diungkap secara transparan ke publik. Jangan sampai korban dan keluarga korban tidak mendapatkan keadilan yang layak," katanya.

Terakhir Netty meminta pada para penyelenggara kegiatan yang melibatkan massa agar memperhatikan SOP kegiatan dengan benar. "Segala sesuatunya harus dapat diantisipasi sejak awal. Jangan baru terkejut setelah timbul korban akibat salah prosedur. Masyarakat juga harus waspada menjaga keselamatan dirinya," katanya. • **ann/aha**



Komisi IX Mengkritik Kurangnya Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan

Rombongan Panitia Kerja (Panja) kemanfaatan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara untuk membahas cara peningkatan jumlah peserta dan meningkatkan besarnya manfaat bagi masyarakat baik itu yang pekerja formal ataupun yang informal dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengkritik kurangnya sosialisasi dan keterbatasan masyarakat mendapatkan informasi dari BPJS Ketenagakerjaan yang mengakibatkan kurangnya jumlah kepesertaan.

"Panja ini dibuat supaya ada peningkatan jumlah peserta untuk pekerja sektor informal supaya bisa membantu ketika pekerja informal ini mengalami kecelakaan, musibah meninggal jadi ada manfaat yang dirasakan oleh peserta dari BPJS Ketenagakerjaan untuk teman-teman pekerja informal dan juga disertakan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Kurniasih Mufidayati, saat di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sumut, Jumat (30/9).

Lebih lanjut Kurniasih juga mendorong adanya Penerima Bantuan Iuran (PBI) Ketenagakerjaan, dimana kita selama ini hanya mengenal PBI BPJS Kesehatan saja. Oleh sebab itu, Panja mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran untuk



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati saat pertemuan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sumut, Jumat (30/9).

jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja miskin, rentan dan tidak mampu atau PBI jamsosnaker untuk masyarakat pekerja bukan penerima upah (BPU), seperti nelayan, petani, pekerja rumahan, tukang ojek, penjual sayur dan lain-lain sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

"Persoalan yang tadi ada dalam pertemuan banyaknya jumlah perusahaan yang belum mendaftarkan kepesertaan dari pekerjanya di perusahaan tersebut,

banyak alasan yang kita temukan di lapangan karena memang kondisi pandemi khususnya kemarin, kondisi ekonomi perusahaan itu menurun, juga *political will* dari perusahaan itu sendiri masih sangat rendah dan ketegasan dari pemerintah khususnya Dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan agar segera mendaftarkan pekerjanya untuk mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya. • **man/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Legislator Tekankan, Satgas Pengawasan TKA Sangat Dibutuhkan



FOTO: ARF/PDT

Anggota komisi IX DPR RI Darul Siska saat bertukar cenderamata usai pertemuan komisi IX dengan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Kadis Transmigrasi dan Tenaga kerja Morowali, Indonesia Morowali Industrial Park, Palu, Jumat (30/9/2022).

Anggota komisi IX DPR RI Darul Siska mengatakan keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Morowali masih menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu ia menilai perlunya pembentukan satgas pengawasan tenaga kerja asing agar informasi terkait jumlah dan status TKA di Indonesia dapat diketahui.

"Setelah ada pembenahan sekarang tidak lagi banyak muncul masalah, walaupun semuanya belum selesai. Nah yang belum selesai ini

saya kira menjadi perhatian kami umpamanya masih dianggap kurang tenaga pengawas bagi TKA di sana sementara TKA yang datang dan pergi ini masih banyak jumlahnya," sebut Darul Siska usai pertemuan komisi IX dengan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Kadis Transmigrasi dan Tenaga kerja Morowali, Indonesia Morowali Industrial Park, Palu, Jumat (30/9).

Darul Siska menjelaskan alih teknologi antara pekerja asing dan pekerja lokal belum berjalan dengan optimal karena kendala

bahasa dan keterbatasan Balai Latihan Kerja (BLK) yang belum mengantisipasi kebutuhan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan seperti operator alat berat, sementara BLK-nya baru akan dibangun.

"Saya kira ini merupakan tantangan, kemudian sinergisitas di tingkat pemerintah daerah dengan dinas tenaga kerja dengan perusahaan ini juga masih perlu ditingkatkan umpamanya ada fasilitas yang mau diberikan oleh pihak-pihak investor perusahaan pada anak-anak muda kita di Morowali tetapi yang mau dilatih orangnya belum cukup umpamanya dibutuhkan 1000 mencari 1000-nya susah saya kira ini masalah," tegasnya.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini, menjelaskan terkait permasalahan pendataan kependudukan yang sudah bekerja namun masih belum sesuai antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan kabupaten. Lanjut Darul Siska, menurut provinsi, ada tingkat pengangguran yang tinggi di sana, yang mana sebenarnya memang disebabkan oleh peralihan status kependudukan. Dimana pendatang kemudian di data sebagai orang yang menganggur kemudian dipindah ke tempat lain sudah bekerja.

"Akurasi datanya tidak diperbarui setiap saat sehingga ada kesan investasinya sudah makin besar tetapi tingkat penganggurannya juga makin tinggi. Ini yang harus diselesaikan, akurasi data, kemudian sinergisitas antar kelembagaan ini agar mempunyai informasi yang sama. Kami dari DPR melihat bahwa ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian untuk kita sampaikan kepada kementerian tenaga kerja, soal BLK, soal tenaga pengawas kemudian juga fasilitas operasional untuk pengawasan di sana," pungkas Darul. • **afr/aha**



Tragedi Sepak Bola Kanjuruhan, Komisi X Menyesalkan dan Turut Berduka Cita

Belum lama ini terjadi tragedi dalam persepakbolaan Indonesia yang bertempat di stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang yang menyebabkan korban jiwa lebih dari 130 orang. Menanggapi hal tersebut, Komisi X DPR RI menyesalkan dan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas tragedi yang berlangsung pada pertandingan Sepakbola BRI Liga 1 pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang.

"Komisi X DPR RI akan segera melakukan rapat (Raker, Raker Gabungan atau RDP) pada masa reses di Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dengan para pihak, yaitu Kemenpora

RI, Kepolisian RI, PSSI, PT Liga Indonesia Baru, Perwakilan Suporter, Panitia Pelaksana, dan Indosiar." ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam Konferensi Pers yang disampaikan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/10).

Komisi X DPR RI pun mendesak pemerintah, untuk melakukan investigasi atas tragedi tersebut dan harus ada yang bertanggungjawab. Tim investigasi antara lain terdiri dari pihak kepolisian, Kemenpora RI, Komnas HAM, PSSI, perwakilan suporter dan perwakilan unsur masyarakat olahraga.

"Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menegakkan UU Nomor 11 tahun

2022 tentang Keolahragaan, khususnya terkait penyelenggaraan kejuaraan dan suporter, dan mendesak untuk segera menerbitkan peraturan turunan dari UU tersebut," lanjut Huda.

Komisi X DPR RI pun mendesak untuk menghentikan sementara Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 dan kompetisi sejenis lainnya sampai adanya perbaikan nyata terhadap tata kelola penyelenggaraan kejuaraan sepakbola.

"Kami juga mendesak PT. Liga Indonesia Baru untuk segera memberikan kepastian jaminan asuransi terhadap hak-hak korban tragedi sepak bola Kanjuruhan Malang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya. • **hal/aha**



FOTO: RNI/PDT

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat Konferensi Pers yang disampaikan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2022).

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Komisi X: Kebijakan Akreditasi Perlu Dievaluasi Kembali

Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan tentang akreditasi. Hal ini mengingat adanya keluhan dari universitas terkait akreditasi program studi yang kini beralih dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menjadi ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM-PT). Diketahui, kini BAN-PT hanya melakukan akreditasi pada institusi perguruan tinggi, bukan program studi.

"Ini saya kira memang perlu dievaluasi ini, pemerintah itu saya kira perlu meninjau kembali ya kebijaksanaan tentang akreditasi ini," ujarnya usai memimpin Tim Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI bertemu rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), serta pemangku kepentingan bidang Perguruan Tinggi Jawa Timur, di Universitas Merdeka Malang, Jatim, Jumat (30/9).

Keluhan yang disampaikan oleh rektor PTN dan PTS yang mengemukakan dalam pertemuan tersebut, di antaranya terkait dengan mahalannya biaya akreditasi yang dibebankan kepada universitas. Untuk akreditasi program studi, biaya yang dibebankan adalah Rp57,5 juta sedangkan untuk banding adalah sebesar Rp29,7 juta.

"LAM Dikti itu dengan (biaya akreditasi) Rp52 juta dan bisa dicicil itu dianggap ringan gitu, tetapi bagi perguruan tinggi yang kami dengar tadi itu merupakan beban yang luar biasa. Dan kalau kemudian hasil yang pertama itu masih harus banding, banding bayar lagi

”

KELUHAN YANG DISAMPAIKAN OLEH REKTOR PTN DAN PTS YANG MENGEMUKA DALAM PERTEMUAN TERSEBUT, DI ANTARANYA TERKAIT DENGAN MAHALNYA BIAYA AKREDITASI

Anggota Komisi X DPR RI
Zainuddin Maliki

Rp29 juta. Ini luar biasa, itu belum LAM kesehatan, LAM kedokteran yang bisa lebih dari Rp100 juta itu. Ini saya kira (biaya akreditasi) memang perlu dievaluasi ini, pemerintah itu saya kira perlu meninjau kembali (kebijakan akreditasi)," jelas Zainuddin.

Untuk itu, menurut Politisi Fraksi PAN tersebut, beban berat bagi universitas ini perlu ditelaah kembali. "Itu tentang akreditasi, saya kira itu perlu telaah kembali, di mana perguruan tinggi itu diberi kesempatan untuk menghindari beban yang berat itu, itu saya kira harus dipikirkan," tutupnya. • **bia/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: BIA/PDT

Firman Soebagyo Dorong Sertifikasi Bidan dan Perawat Standar Internasional

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah untuk melakukan sertifikasi internasional untuk bidan dan perawat. Dia merasa prihatin melihat bidan dan perawat yang bekerja di luar negeri tapi digaji dengan standar tenaga imigran biasa. Padahal kemampuan bidan dan perawat asal

Indonesia tidak kalah dengan profesi serupa dari negara lain.

Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat RDPU dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI),

Persatuan Perawat Nasional

Indonesia (PPNI), Ikatan

Ahli Kesehatan

Masyarakat

Indonesia

(IAKMI), dan

Ikatan Apoteker

Indonesia (IAI),

dalam rangka

Penyusunan

RUU tentang

Kesehatan.

Anggota Badan
Legislasi (Baleg) DPR RI
Firman Soebagyo

"Padahal kita juga punya SDM yang tidak kalah cerdasnya, tuntutan itu yang kami minta kepada pemerintah agar diberikan sertifikat standar internasional, sehingga kalau bidan, perawat dan tenaga kesehatan kerja di luar negeri mendapatkan gaji sesuai standar internasional," papar Firman di Ruang Rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/10).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun mengungkapkan di negara lain sudah memberikan apresiasi yang baik bagi profesi bidan dan perawat, namun sayangnya di Indonesia belum melakukan itu. "Waktu itu kami berkunjung ke Saudi Arabia, itu banyak yang mereka profesinya sebagai bidan dan perawat tetapi gajinya masih standar TKW, ini memprihatinkan. Di Filipina itu gajinya standar internasional sebagai perawat," ujar Firman.

Dia pun mengapresiasi Baleg yang menginisiasi untuk menyempurnakan RUU tentang Kesehatan. Menurutnya undang-undang tersebut masih perlu penyempurnaan. Firman menyarankan agar IBI, PPNI, IAKMI dan IAI membentuk tim untuk



**NEGARA LAIN SUDAH
MEMBERIKAN
APRESIASI YANG BAIK
BAGI PROFESI BIDAN
DAN PERAWAT**

memberikan masukan kepada Baleg dalam penyempurnaan undang-undang tersebut.

"Memang DPR punya kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan undang-undang. RUU tentang Kesehatan memang perlu dilakukan evaluasi menyeluruh," jelas Firman. • ssb/aha

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: DEP/PDT

Bahas Berbagai Isu Krusial, P20 Hasilkan 'Chair's Summary'



Ketua BKSAP Fadli Zon saat mengikuti rangkaian penutupan P20 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10/2022).

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan, pertemuan 'The 8th G20 Parliamentary Speaker's

Summit' (P20) yang telah berlangsung selama tiga hari sejak Selasa (5/10) hingga Jumat (7/10), telah menghasilkan suatu ringkasan pembicaraan atau *chair's summary*.

"Kita memang ada satu *chair's summary* yang merupakan suatu ringkasan dari semua pembicaraan, dibuat dan akan dibagikan kepada seluruh peserta," ujar Fadli usai penutupan P20 kepada Parlementaria, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10).

Ia menambahkan memang tidak ada *joint statement* yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Mengingat, masih adanya hal-hal yang tidak disepakati oleh masing-masing delegasi, utamanya terkait pandangan terhadap konflik Rusia dan Ukraina.

"Ada banyak hal yang disepakati, banyak poin. Tetapi ada beberapa hal yang tidak disepakati yang masih perlu kerja keras, terutama yang terkait dengan pandangan soal perang antara Rusia dengan Ukraina. Itu tidak mencapai suatu kesepakatan, sehingga kita tidak ada satu *joint statement* yang konsensus," jelasnya.

Posisi Indonesia sendiri, menurut Fadli sebenarnya ingin menjadi jembatan dengan memfasilitasi melalui forum P20 tersebut. "Kita kan menganut politik bebas aktif,

P20 Dorong Tingkatkan Keterlibatan Perempuan di Dunia Politik

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri berharap penyelenggaraan 'Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speaker's Summit' (P20) mendorong keterlibatan perempuan di dunia politik. Pasalnya, perempuan di dunia termasuk Indonesia, yang terjun ke dunia politik dinilai belum maksimal terlibat mengambil keputusan publik.



Anggota BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri

"Saya pikir, menjadi tantangan utama parlemen di seluruh dunia untuk melibatkan perempuan secara utuh di dalam setiap pengambilan keputusan publik. Padahal, jika perempuan berdaya, akan membuat negara semakin kuat," ucap Irine kepada **Parlementaria** usai mengikuti rangkaian kegiatan P20 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10).

Lebih lanjut, jelas politisi Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu, P20

kita tentu saja menghargai hukum internasional, tetapi kita sebenarnya ingin menjadi *bridge builder*, kita ingin menjadi jembatan, ingin memfasilitasi tetapi kelihatannya belum ketemu," imbuhnya.

Beberapa isu krusial yang dibahas dalam tiga hari terakhir diantaranya adalah berkaitan dengan tantangan global, ketahanan pangan dan energi, terkait demokrasi dan peran parlemen, tentang pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, serta menyangkut pula persoalan *climate change* dan keterlibatan sosial dan kesetaraan gender.

"Secara keseluruhan hasil dari kemarin, telah membahas semua isu-isu krusial prioritas baik itu terkait tantangan-tantangan global, ketahanan pangan, ketahanan energi, soal demokrasi dan peran parlemen dan juga sebelumnya tentu tentang pembangunan berkelanjutan dan *green economy*, terkait juga di dalamnya soal *climate change* dan yang terakhir tadi soal *social inclusion* dan *gender equality*," terang Fadli. • **bia/es**

Scan QR untuk berita selengkapnya



akan membahas salah satu isu *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu kesetaraan gender. Hadirnya forum seperti ini, ia ingin menyuarakan bahwa kesetaraan gender berpotensi menyadarkan perempuan parlemen dengan kekuatan mereka sendiri untuk ambil andil tanpa ragu menjalankan tugas dan fungsi di parlemen.

"Di dalam forum-forum seperti ini, pun lagi-lagi, parlemen harus menyadari goal dari setiap undang-undang, penganggaran ataupun pengawasan itu harus mengutamakan gender. Jadi, kesetaraan gender, pengaruh utama gender itu harus termasuk di dalamnya, sehingga perempuan jadi berdaya," tuturnya. • **ts/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Parlemen Indonesia-Korea Selatan Saling Dukung Hadapi Krisis Global

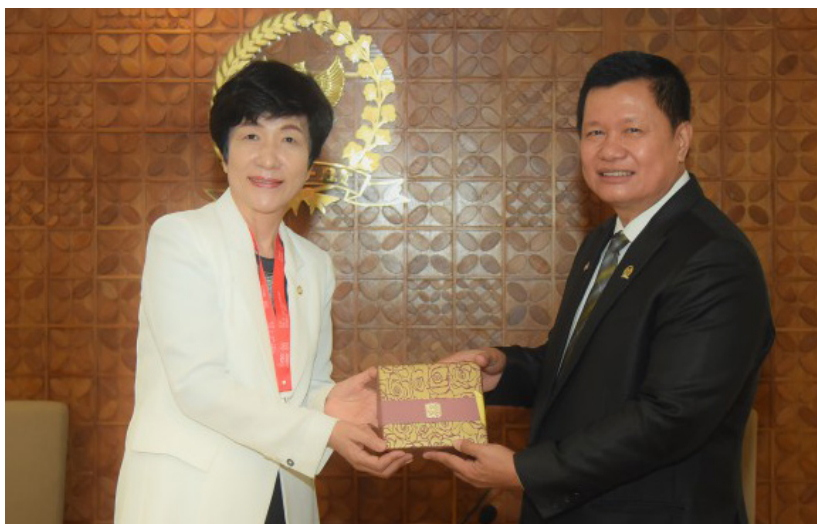


FOTO: RNV/PDI

Ketua GKSBI DPR RI – Parlemen Korea Selatan Edward Tannur saat bertukar cenderamata usai menggelar pertemuan bilateral dengan Deputy of the National Assembly of South Korea Kim Young Joo.

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSBI) DPR RI-Parlemen Korea Selatan Edward Tannur menggelar pertemuan bilateral dengan Deputy of the National Assembly of South Korea, Kim Young Joo. Pada pertemuan tersebut, masing-masing parlemen sepakat untuk mempererat kerja sama di berbagai sektor krusial.

"Kami ingin melakukan pertukaran pengetahuan dan informasi terutama di bidang teknologi. Yang mana teknologi bisa mendorong kemajuan teknologinya untuk keluar dari krisis, seperti krisis pangan," ucap Edward usai bertemu dengan Parlemen Korea Selatan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10).

Selain itu, politisi PKB itu juga sepakat bahwa faktor manusia yang menentukan kemajuan bangsa. Sehingga, potensi manusia baik di Indonesia dan Korea Selatan bisa dikembangkan secara maksimal dengan saling bertukar pikiran guna membangun kedua negara yang tangguh hadapi krisis.

Terakhir, ia menyampaikan dengan mengusung tema *Stronger Parliament for Sustainable Recovery*, P20 sebagai *engagement group G20* diharapkan menjembatani kebutuhan berbagai negara dalam menangani krisis, seperti Indonesia dan Korea Selatan. "Di masa kini dan nanti, kita ingin Indonesia dan Korea Selatan bisa cepat pulih, lebih cepat tumbuh dan semakin kuat," tutup Edward. • **ts/es**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Minimalisir Polarisasi, P20 Utamakan Dialog dalam Demokrasi

Di tengah situasi konflik global yang kini terjadi, demokrasi Indonesia dinilai tetap berjalan *on the track*. Sehingga, DPR RI sebagai tuan rumah 'Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speaker's Summit' (P20) berupaya menanamkan semangat para perwakilan parlemen anggota G20 agar tetap menjaga demokrasi yang vibran dan kondusif, dengan mengedepankan dialog guna meminimalisir polarisasi.

Demikian tanggapan tersebut diutarakan oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir kepada Parlementaria usai mengikuti rangkaian forum P20 dengan tema 'Effective Parliament, Vibrant Democracy' di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2022). Sejak melewati masa reformasi, ungkapnya, demokrasi Indonesia turut mengarah pada tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

"Kita (Indonesia) yang sudah mengimplementasikan demokrasi modern, masa-masa reformasi sejak tahun 1998 itu semakin hari menunjukkan kualitas demokrasi yang lebih baik. Walaupun ada perbedaan yang sangat tajam antara blok Rusia dan blok membela Ukraina, demokrasi kita sudah berjalan *on the track*," tutur Hafisz.

Politisi Fraksi PAN itu menyoroti negara-negara, seperti Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat, pelopor demokrasi sudah mencapai titik jenuh. Hal ini bisa dibuktikan dengan terjadinya penurunan jumlah pemilih yang signifikan pada pemilihan umum. Indonesia, baginya, berpotensi menjadi negara acuan untuk mempertahankan demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan yang lebih baik.

"Demokrasi (Indonesia) sangat diterima, lalu direspon positif oleh investasi para pelaku bisnis. Jadi, ini sangat penting bagi kita. Dalam transformasi energi perlu dukungan investasi dan dukungan kepercayaan dunia untuk memasukkan modalnya ke Indonesia," ucapnya.

Terakhir, dirinya menekankan harus ada regenerasi dalam demokrasi. Dari sudut pandangnya, anak-anak muda harus diberikan peluang untuk berkecimpung di dunia politik. Tanpa keterlibatan mereka, jelasnya, kebijakan-kebijakan publik yang diputuskan menjadi tidak relevan dengan kondisi sekaligus situasi pada masa mendatang. • **ts/aha**



Wakil Ketua BKSAP DPR RI
Achmad Hafisz Tohir

FOTO: JKA/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Momentum Penerapan Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari



FOTO: BEP/PDT

Pit Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Suprihartini diwawancara usai upacara, Senin (03/10)

Memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada setiap 1 Oktober, Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Sekretariat Jenderal MPR RI dan DPR RI menyelenggarakan upacara bendera di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senin (3/10). Plt Deputi Persidangan Suprihartini mengatakan momentum Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kembali pada kejadian sejarah dalam mempertahankan ideologi Pancasila, yaitu kejadian sejarah G30S PKI.

Momentum sejarah tersebut, menurutnya penting untuk menjadikan kita sebagai rakyat Indonesia senantiasa menjadikan Pancasila sebagai pegangan hidup dan pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Sebab, Pancasila merupakan ideologi

dasar bagi Bangsa Indonesia yang mengatur segala aspek kehidupan sehari-hari.

"Dengan Pancasila sebagaimana kita ketahui merupakan pondasi dasar ideologi Bangsa Indonesia dalam mengatur penyelenggaraan tata negara yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi dan ini juga merupakan satu momentum bagi kita semua agar kita senantiasa menjadikan Pancasila sebagai pegangan hidup, pandangan hidup dan dasar negara kita," ujarnya kepada **Parlementaria**, usai pelaksanaan upacara.

Untuk itu, Suprihartini berpesan kepada Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Setjen DPR RI agar senantiasa menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup utamanya dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dengan baik sehingga dapat memberikan layanan yang baik pula kepada masyarakat.

"Untuk teman-teman ASN dan juga untuk kita semua, marilah kita jadikan Pancasila terus bersama dalam falsafah hidup kita, dalam ideologi kita, dalam menjalankan semua kegiatan penyelenggaraan negara, khususnya bagi kita ASN dalam memberikan layanan kepada masyarakat," tutupnya. • [gal,bia/aha](#)

Urgensi Penanganan Kejahatan Siber Secara Holistik di Indonesia

Semakin meningkatnya jumlah pengguna internet akan sejalan dengan tingkat utilisasi internet. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan peningkatan pengguna internet secara signifikan di Indonesia hingga mencapai 52,6 juta orang yang berdampak pada kenaikan nilai transaksi *e-commerce*, transaksi digital perbankan, jumlah pengguna layanan pendidikan daring, dan layanan *teleconference*.

Selain memberikan kemudahan, bertambahnya pengguna internet juga berdampak pada adanya potensi peningkatan kejahatan siber namun sampai saat ini di Indonesia belum ada regulasi hukum khusus mengenai kejahatan siber. Dasar hukum yang digunakan hanya mengacu pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengakomodasi mengenai kejahatan siber yang saat ini dipandang belum cukup, hal ini dikarenakan UU ITE belum mendefinisikan kejahatan siber secara hukum.

Selain penguatan dari sisi regulasi, penguatan dari sisi manusia atau SDM Indonesia juga tidak kalah penting untuk memperkuat ketahanan siber dan menekan dampak kerugian ekonomi yang dapat mengancam stabilitas negara seiring semakin terintegrasinya teknologi dalam berbagai aktivitas warga negara, termasuk aktivitas ekonomi.

Kejahatan siber yang menyerang berbagai domain, mulai dari keuangan hingga pertahanan, perlu diatasi secara terkoordinasi, melibatkan berbagai stakeholder lintas sektor, dan terencana dari pencegahan hingga penanggulangan.

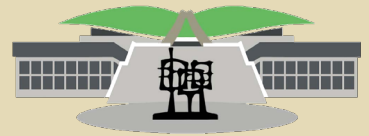


(Tim Pusaka AKN, diolah dari berbagai sumber)



Scan QR untuk berita selengkapnya





Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat membuka gelaran The G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20), di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10). FOTO: JKA/PDT



Penanaman pohon saat kegiatan Konferensi P20 di Kompleks Parlemen, Jumat (7/10). FOTO: JKA/PDT



Konferensi P20 yang berlangsung di R. KK II, Gedung Nusantara, (6-7/10). FOTO: JKA/PDT

